

Received: 22 November 2022

Accepted: 28 January 2023

Published: 30 January 2023

Ancaman Terorisme dan Strategi Penanganannya: Studi Pustaka Strategi Kontra-Terrorisme di Kamboja

Beny Abukhaer Tatara^{1*}, Titis Margiyati², Fauzia Gustarina Cempaka Timur³

^{1,2,3}, Prodi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan RI

*benyabukhaertatara@gmail.com

Abstract

Various counter-terrorism efforts have been carried out by the Cambodian government, resulting in Cambodia being ranked 135th on the Global Terrorism Index as a country affected by terrorist action with a score of 0.00, meaning there are no more threats or acts of terrorism in Cambodia. This research aims to analyze the counter-terrorism efforts that have been carried out by the Government of Cambodia. This research uses a qualitative research method with a literature study approach. The results of the research show that in Cambodia, there are 7 (seven) terrorist groups, both domestic and foreign, namely: the Khmer Rouge; Cambodian Freedom Fighters /CFF; Khmer Front Movement; the Khmer National Unity Front / KNUF; Khmer National Liberation Front / KNLF; Empire Movement, and the Jemaah Islamiah / JI through the Om Al Qura Foundation. The strategy taken by the Government of Cambodia to address terrorism includes: the formation of counter-terrorism laws, the formation of special counter-terrorism forces and closing access to terrorism financing. In addition, at the ASEAN regional level, the Cambodian government has established cooperation with ASEAN countries in addressing terrorism through information exchange, joint training, and extradition. Meanwhile, at the international level, Cambodia also cooperates in counter-terrorism with the United States and Australia.

Keywords: *strategy, counter-terrorism, Cambodia*

Abstrak

Berbagai upaya kontra-terorisme telah dilakukan pemerintah Kamboja, hingga akhirnya Kamboja berdasarkan *Global Terrorism Index* menempati peringkat 135 negara terdampak aksi terorisme dengan skor 0,00 artinya tidak ada lagi ancaman maupun aksi terorisme di Kamboja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya kontra-terorisme yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kamboja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kamboja tercatat ada 7 (tujuh) kelompok teroris baik dari dalam negeri maupun luar negeri yaitu : Khmer Merah (*the Khmer Rouge*); Pejuang Kemerdekaan Kamboja (*Cambodian Freedom Fighters / CFF*); Gerakan Front Khmer (*Khmer Front Movement*); Front Persatuan Nasional Khmer (*the Khmer National Unity Front / KNUF*); Front Pembebasan Nasional Khmer (*Khmer National Liberation Front / KNLF*); Gerakan Kekaisaran (*Empire Movement*) dan Jamaah Islamiah (*the Jemaah Islamiah / JI*) melalui Yayasan Om Al Qura (*the Om Al Qura Foundation*). Strategi yang telah diambil oleh Pemerintah Kamboja untuk menanggulangi terorisme meliputi: pembentukan undang undang penanggulangan terorisme, pembentukan pasukan khusus penanggulangan terorisme dan menutup akses pendanaan terorisme. Selain itu, pada tingkat regional ASEAN, pemerintah Kamboja membentuk kerjasama dengan negara – negara ASEAN dalam menanggulangi terorisme melalui pertukaran informasi, latihan bersama dan ekstradisi. Sedangkan pada tingkat internasional Kamboja juga melakukan kerjasama penanggulangan terorisme dengan Amerika Serikat dan Australia.

Kata kunci: *strategi, kontra-terorisme, Kamboja*

1. Pendahuluan

Awal abad ke-21 seperti saat sekarang ini, telah muncul isu yang sangat besar pengaruhnya terhadap tatanan politik ekonomi global saat ini yaitu terkait terorisme. Meskipun isu mengenai terorisme telah ada secara dominatif pada masa Perang Dingin dan sesudahnya, namun klimaks

dari menguatnya gejala ini adalah meletusnya tragedi WTC dan Pentagon, AS, pada tanggal 11 September 2001 lalu. Pasca serangan bunuh diri yang menewaskan lebih dari 6.000 orang dengan menabrakkan pesawat komersial ke lambang kedigdayaan ekonomi dan militer AS tersebut, telah menyadarkan masyarakat dunia akan bahaya dan ancaman terorisme global (Subagyo, 2015). Sebagai sebuah isu global, ancaman terorisme telah menyerang berbagai negara di berbagai belahan dunia. Di Eropa, Sejak tahun 2013, jumlah kasus terorisme di Uni Eropa mengalami peningkatan. Menurut laporan BBC, dari tahun 2011 hingga 2018, kasus terorisme terbanyak terjadi di Spanyol dengan jumlah 343 kasus. Di posisi kedua ditempati oleh Inggris dengan total 329 kasus, kemudian Prancis dengan 327 kasus, dan Belgia sebanyak 301 kasus (Hutasoit et al., 2021). Di tempat lain terorisme juga terjadi di tengah-tengah konflik sosial politik, yang becampur dengan isu-keagamaan seperti di Nigeria, Somalia, Libya, Maroko, Mesir, Irak, Suriah dan Yaman. Konflik-konflik itu kemudian melebar kenegara-negara lain seperti Arab Saudi, Kuwait, Yordan, Libanon di Timur-Tengah, Afghanistan, Pakistan, India di Asia Selatan, Indonesia, Filipina dan Thailand di Asia Tenggara (Yunanto et al., 2017). Di Kawasan Asia Tenggara, terorisme merupakan salah satu masalah serius mengingat Asia Tenggara dianggap sebagai salah satu kawasan yang berpotensi menyimpan radikalisme dan Terorisme. Serangan-serangan terorisme yang telah terjadi di kawasan Asia Tenggara telah mengganggu stabilitas keamanan setiap negara yang berada di kawasan Asia Tenggara (Korompis, 2020). Konflik intern di negara kawasan tersebut, bisa saja memancing jaringan internasional untuk melakukan aksi-aksi teror di kawasan tersebut. Sebagai contoh aksi terror yang di lakukan oleh kelompok Khmer Rouge di Kamboja dan gerilyawan Moro di Philipina Selatan (Simanjuntak, 2012).

Kamboja adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang terletak di bagian selatan Semenanjung Indochina dengan luas wilayah sekitar 182.000 meter persegi dan memiliki dua bentuk geografis yang berlainan, yaitu yang pertama dataran rendah (Delta Mekong dan Tonle Sap yang merupakan danau besar urat nadi Kamboja) dan yang kedua kawasan pegunungan yang terletak di Barat Daya, Utara dan Timur Laut Kamboja dengan sebagian besar diliputi oleh hutan rimba dan bukit – bukit pegunungan mengelilingi dataran rendah Kamboja (Widya, 2008). Kondisi tersebut menjadikan tantangan tersendiri bagi keamanan transnasional Kamboja seperti penyelundupan senjata, penyelundupan imigran, penyelundupan narkoba dan terorisme. Meskipun Kamboja saat ini tidak terancam oleh kelompok teroris domestik terorganisir yang signifikan yang saat ini beroperasi di negara tersebut, pemerintah Kamboja tetap berhati-hati terhadap ancaman regional dan telah mengklasifikasikan terorisme sebagai salah satu masalah keamanan transnasional utama. Pemerintah merujuk kerentanan Kamboja terhadap terorisme dan potensinya untuk digunakan sebagai “tempat berlindung” karena kedekatan geografisnya dengan serangan baru-baru ini dan kedekatannya dengan area jaringan operasi teroris oleh kelompok-kelompok seperti Jamaah Islamiyah (JI) Indonesia (Ear dalam Asia-Pacific Center for Security Studies, 2010).

Sejak penarikan pasukan Vietnam pada awal 1990-an, negara tersebut telah melihat peningkatan pengaruh Wahhabi di antara Cham Muslim, dan telah menerima dana dari sekolah-sekolah Wahhabi di Timur Tengah. Kelompok-kelompok militan dapat mengeksploitasi meningkatnya radikalisasi Muslim Cham dan terlibat dalam perdagangan senjata ilegal. Kamboja juga merupakan pusat pencucian uang terkemuka, terutama untuk obat-obatan terlarang dari Burma dan Laos. Kehadiran JI terkait Al Qaeda di Asia Tenggara menunjukkan bahwa Kamboja bisa menjadi lokasi yang nyaman untuk kegiatan teroris dan menjadi salah satu “batu loncatan potensial” di Asia Tenggara untuk ekstremisme agama. Selain itu, sejak 1990-an, negara-negara Indochina seperti Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Thailand telah digunakan oleh kelompok teroris transnasional Al-Qaeda sebagai basis dan sasaran serangan teroris. Kamboja pertama kali berada di bawah pengawasan ketat internasional pasca 11 September setelah diketahui

bahwa Al-Qaeda dan kelompok Jamaah Islamiah (JI) yang terkait dengan Al Qaeda di Asia Tenggara menggunakan Phnom Penh sebagai lokasi untuk pengiriman uang yang signifikan. Ditambah dengan data bahwa antara tahun 2002-2003, Hambali yang merupakan seorang dalang bom Bali 2002, dilaporkan mengungsi ke Kamboja. Kaum radikal dari Arab Saudi, Pakistan, dan Malaysia juga diduga menggunakan Kamboja sebagai basis (Gunaratna & Kam, 2016). Sebagai negara yang berada dalam satu kawasan di Asia Tenggara, Indonesia perlu waspada akan perkembangan isu Terorisme di Kamboja mengingat sejarah membuktikan teroris yang pernah melakukan aksinya di Indonesia pernah berada di Kamboja, selain itu Kamboja juga dijadikan basis kelompok teroris. Selain itu, perlu juga dipelajari terkait keberhasilan Kamboja melepaskan negaranya dari ancaman Terorisme. Hal ini sesuai dengan data *Global Terrorism Index* (Institute for Economics & Peace, 2020) yang menempatkan Kamboja di peringkat ke 135 negara terdampak aksi terorisme dengan skor 0,00 artinya tidak ada lagi aksi terorisme dan ancaman Terorisme di Kamboja saat ini. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja dalam upaya kontra-terorisme.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yang dijawab melalui pemahaman, bukan dengan hipotesis, karena inti dari penelitian kualitatif adalah memahami suatu fenomena, bukan membuktikan suatu fenomena. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dari studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, setidaknya ada empat ciri utama yang perlu diperhatikan penulis, antara lain: *pertama*, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data numerik, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. *Kedua*, data perpustakaan “siapa pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung ke lapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. *Ketiga*, bahwa data perpustakaan pada umumnya merupakan sumber sekunder, dalam arti peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data asli dari data pertama di lapangan. *Keempat*, bahwa kondisi data perpustakaan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, 2014). Data – data dikumpulkan dari sumber sekunder dari buku dan hasil penelitian yang terkait kemudian dianalisis peneliti untuk diinterpretasikan dalam penelitian ini. Menurut Creswell (Creswell & Poth, 2018), studi literatur adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah dokumen kualitatif seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, laporan, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Hal ini dilakukan dengan mengkaji dan/atau menelusuri beberapa jurnal, buku, dan dokumen (baik dalam bentuk cetak maupun elektronik) serta sumber data dan/atau informasi lain yang dianggap relevan dengan penelitian atau penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Miles, Huberman & Saldana (2014) terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ancaman Terorisme di Kamboja

Ancaman Terorisme dari Dalam Negeri

Ancaman teroris dalam negeri memiliki tujuan untuk mengambil alih kekuasaan. Data aksi dan ancaman terorisme di Kamboja dalam kurun waktu 2005 – 2013 menunjukkan bahwa ada sekitar 77 aksi dan ancaman terorisme yang terjadi di Kamboja (Anshori, 2018). Adapun kelompok teroris yang ada di Kamboja antara lain Khmer Merah (*the Khmer Rouge*) dan Pejuang Kemerdekaan Kamboja (*Cambodian Freedom Fighters / CFF*) (Yahzunka et al., 2018). serta kelompok yang lebih kecil seperti Front Persatuan Nasional Khmer (*the Khmer National Unity*

Front / KNUF), Front Pembebasan Nasional Khmer (*Khmer National Liberation Front / KNLF*) dan Gerakan Kekaisaran (*Empire Movement*) (Gunaratna & Kam, 2016).

Pertama kelompok Khmer Merah (*the Khmer Rouge*). Asal-usul ancaman teroris Kamboja dimulai dari kelompok Khmer Merah. Hal ini dapat ditelusuri kembali ke tahun Perang Saudara 1970-1975, dengan munculnya kelompok Khmer Merah dan penyebaran kelompok taktik teroris terhadap tentara Kamboja. Dipimpin oleh Perdana Menteri saat itu Jenderal Lon Nol, tentara Kamboja melemah karena harus berperang di dua sisi yaitu untuk melawan Vietnam Utara dan kelompok Khmer Merah. Pada April 1975, Khmer Merah merebut kekuasaan. Dipimpin oleh Pol Pot, nama Kamboja diubah menjadi Demokratik Kampuchea. Pol Pot menerapkan komunisme di Kamboja, mengubah politik, ekonomi, dan masyarakat negara itu. Selama tiga tahun pemerintahan teror mereka, Khmer Merah membawa kehancuran bertahap ke negara itu dan membunuh sekitar 1,7 juta orang (Gunaratna & Kam, 2016), sehingga Khmer Merah tercatat sebagai salah satu rezim paling brutal dalam sejarah dunia modern dan Khmer Merah merupakan bentuk terorisme yang dilakukan oleh negara terhadap warganya dengan kebijakan politik otoriter (Jahroni & Makruf, 2016). Selain itu, Khmer Merah juga telah dicap sebagai organisasi teroris asing oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 8 Oktober 1997 dan kemudian dihapus pada 8 Oktober 1999 (Bureau of Counterterrorism US Department of State, 2022).

Partai Komunis Khmer didirikan di Kamboja, pada tahun 1951. Gerakan komunis Kamboja adalah cabang dari Tentara Rakyat Vietnam yaitu Vietnam Utara yang didirikan untuk melawan penjajahan Prancis selama tahun 1940-an. Kemudian membentuk Tentara Revolusioner Kampuchea pada Januari 1968. Sejak itu, nama tersebut kemudian diidentifikasi dengan Partai Komunis Kampuchea (*the Communist Party of Kampuchea / CPK*), milik faksi tertentu di antara kelompok sayap kiri Kamboja. Pada tahun 1981, berubah nama menjadi Partai Demokrat Kampuchea. Pada tahun 1975, Khmer Merah merebut kekuasaan dan pada tahun 1976, membentuk konstitusi baru dengan bendera baru di bawah nama resmi, Kampuchea Demokratik. Rezim Khmer Merah adalah salah satu rezim paling kejam di abad ke-20, bertanggung jawab atas eksekusi, kelaparan, dan kerja paksa, yang mengakibatkan kematian sekitar 1,7 juta orang (DACHS, 2011). Pasca kematian Pol Pot selaku pemimpin Khmer Merah pada tahun 1998, muncul tiga tren terorisme di Kamboja. Pertama, tak lama setelah Khmer Merah menyerahkan pasukan terakhirnya pada tahun 1999, para anggotanya mengambil posisi yang setara di Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja. Kedua, mantan anggota Khmer Merah ini diduga terlibat dalam serangan teroris terhadap partai oposisi politik utama Kamboja. Pada tahun 1997, empat granat dilemparkan ke rapat umum oposisi, yang menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai 150 orang. Pada periode menjelang pemilihan komune 2002, pola kekerasan dan intimidasi oleh pemerintah diamati, karena lebih dari 20 kandidat partai oposisi menjadi sasaran serangan. Ketiga, ada juga serangkaian serangan oleh organisasi teroris berbasis asing, yang menunjukkan Khmer Merah telah menjalin hubungan transnasional di bagian lain dunia untuk mendukung tujuan mereka. Pada tahun 2000, Kamboja diserang oleh sekelompok teroris, yang disebut Pejuang Kemerdekaan Kamboja (*the Cambodian Freedom Fighters / CFF*) yang berbasis di California, kelompok ini melancarkan serangan terhadap instalasi pemerintah di ibu kota Phnom Penh, menewaskan empat orang dan melukai puluhan lainnya. Tempat-tempat umum seperti depot bahan bakar dan tempat hiburan juga menjadi sasaran (Gunaratna & Kam, 2016).

Kedua, Pejuang Kemerdekaan Kamboja (*the Cambodian Freedom Fighters / CFF*). Para Pejuang Kemerdekaan Kamboja (CFF) digambarkan oleh Departemen Luar Negeri AS sebagai "kelompok teroris" yang memiliki tujuan politik untuk menggulingkan Pemerintahan Kamboja (Simanjuntak, 2012). Para Pejuang Kemerdekaan Kamboja (CFF) juga dikenal sebagai *Cholana Kangtoap Serei Chea Kampuchea* di Khmer, adalah organisasi yang berbasis di California yang

didirikan pada tahun 1998 oleh seorang warga AS bernama Chun Yasith. Meskipun ada berbagai laporan tentang jumlah anggota CFF, menurut perkiraan Departemen Luar Negeri AS tahun 2002, kelompok itu diperkirakan tidak lebih dari 100 pejuang bersenjata. Pemberontak beroperasi terutama di timur laut Kamboja, dekat perbatasan Thailand dan didanai oleh kontribusi dari masyarakat Kamboja-Amerika (United States Bureau of Citizenship and Immigration Services, 2003). CFF didirikan di perbatasan Kamboja-Thailand dekat Poipet. Departemen Luar Negeri AS telah menjelaskan CFF sebagai kelompok teroris yang berusaha menggulingkan pemerintah Kamboja. Pemimpin kelompok adalah mantan anggota oposisi utama Kamboja Sam Rainsy Party (SRP) dan setelah kudeta berdarah pada tahun 1997 mengumpulkan dukungan terhadap Perdana Menteri Hun Sen. Ada berbagai laporan tentang ukuran yang tepat dari CFF namun pada tahun 2010 FBI divisi Los Angeles menyatakan bahwa pada November 2000, Chhun dilaporkan memimpin sekitar 200 anggota CFF bersenjata. Pemberontak beroperasi terutama di timur laut Kamboja dekat perbatasan Thailand dan didanai oleh kontribusi dari masyarakat Kamboja-Amerika. CFF mengatur "Operasi Gunung Berapi," yang melibatkan melakukan serangkaian aksi teroris skala kecil yang ditujukan pada sasaran empuk seperti bar karaoke dan klub malam. Sekitar 70 pejuang CFF, dipersenjatai dengan senapan AK-47, granat dan roket, menyerang beberapa gedung pemerintah termasuk Kementerian Pertahanan dan Pangkalan E70 Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja di distrik Dangkor.

CFF menjadi berita utama pada November 2000 ketika mengklaim bertanggung jawab atas serangan terkoordinasi terhadap beberapa fasilitas Pemerintah di Phnom Penh di mana sedikitnya delapan orang tewas dan 14 lainnya terluka. Sebelum serangan November 2000, lima anggota CFF ditangkap pada April 1999 karena merencanakan untuk meledakkan depot bahan bakar di luar Phnom Penh dengan menggunakan senjata anti-tank. Serangan itu digagalkan oleh polisi Kamboja dan lima anggota ditangkap. Pada tahun 2001, CFF menargetkan gedung - gedung pemerintah dalam serangan granat. Pada tahun 2001, Chhun dinyatakan bersalah atas konspirasi, terorisme dan menjadi anggota kelompok bersenjata ilegal. Anggotanya yang lain juga diadili di pengadilan dan sekitar 76 dari mereka dipenjara. Pada tahun 2010, pengadilan AS menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Chhun Yasith atas empat tuduhan, berkonspirasi untuk membunuh di negara asing, berkonspirasi untuk menghancurkan properti publik di negara asing, bersekongkol untuk melanggar tindakan netralitas, dan bersekongkol untuk menggunakan *Weapon of Mass Destruction* (WMD) di negara asing (Gunaratna & Kam, 2016).

Ketiga, Front Pembebasan Nasional Khmer (the *Khmer National Liberation Front* / KNLFF). Front Pembebasan Nasional Khmer (KNLFF) adalah kelompok teroris lokal yang dikenal juga sebagai Gerakan Pembebasan Harimau (the *Tiger Liberation Movement*). atau Gerakan Kepala Harimau (the *Tiger Head Movement*). Kelompok ini didirikan pada tahun 2005, KNUF diyakini beroperasi di provinsi Mondul Kiri, dipimpin oleh Som Ek, mantan anggota Front Pembebasan Nasional Rakyat Khmer yang memiliki kewarganegaraan ganda yaitu Thailand dan Kamboja (Gunaratna & Kam, 2016). Pada tahun 2009, lima tersangka dari Gerakan Kepala Harimau diperiksa atas dugaan keterlibatan mereka dalam merencanakan bom. Pada tahun 2007, kelompok ini juga dituduh terlibat dalam serangan bom di monumen Persahabatan Kamboja-Vietnam dan menargetkan outlet - outlet pemerintah dan media pada tahun 2009 (Chamroun, 2009).

Keempat, Gerakan Front Khmer (*Khmer Front Movement*). Gerakan Front Khmer adalah kelompok bersenjata yang berbasis di provinsi Takeo Selatan di Kamboja. Sebagian besar anggotanya adalah etnis Khmer Krom dan berasal dari wilayah Delta Mekong bagian bawah Vietnam selatan yang kadang-kadang dikenal sebagai Kampuchea Krom. Khmer Krom Vietnam secara etnis mirip dengan kebanyakan orang Khmer Kamboja. Namun, ketika mereka pindah ke Kamboja, mereka dianggap sebagai orang Vietnam. Tujuan kelompok ini adalah untuk

membebaskan Khmer Krom dari kelompok etnis minoritas di Vietnam. Ini terdaftar sebagai kelompok teroris etno-politik (Gunaratna & Kam, 2016).

Kelima, Front Pembebasan Nasional Khmer (*Khmer National Liberation Front*). Pada Maret 2013, polisi Thailand menangkap enam pria Khmer Krom atas tuduhan terorisme dan mendeportasi mereka ke Kamboja. Tiga dari enam pria tersebut yaitu Yorn Kimsrun, Thach Kuong dan Yorn Yoeub merupakan biksu Buddha. Keenam pria itu diidentifikasi sebagai anggota Front Pembebasan Khmer, sebuah kelompok pembangkang yang berbasis di Denmark, dan telah melarikan diri ke Thailand untuk mencari suaka politik. Keenam pria itu didakwa karena diduga membentuk kelompok bersenjata untuk menggulingkan pemerintah Kamboja serta mendistribusikan materi anti-pemerintah, memiliki bahan peledak, dan membentuk Front Pembebasan Nasional Khmer, yang dilarang oleh hukum Kamboja. Pada tahun 2014, pengadilan Kamboja menghukum lebih dari 13 orang yang terkait dengan KNLFF atas rencana untuk menggulingkan pemerintah. Orang-orang itu juga dituduh membentuk angkatan bersenjata yang berbasis di Thailand dan berencana meledakkan bom di gedung-gedung pemerintah di Kamboja, tetapi hubungan ini dilempar sendiri karena tidak cukup bukti.¹⁷ Tujuan utama KNLFF adalah menciptakan angkatan bersenjata untuk digulingkan. pemerintah dan kelompok tersebut telah diklasifikasikan sebagai kelompok teroris isu tunggal (Gunaratna & Kam, 2016).

Keenam, Gerakan Kekaisaran (*Empire Movement*). Gerakan Kekaisaran dimulai oleh sekelompok Muslim Cham. Gerakan itu dituduh pada 2007 menciptakan kelompok pemberontak dengan rencana untuk mengambil alih bagian dari Thailand dan Vietnam. Pihak berwenang Kamboja menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam rencana untuk merekrut ratusan orang untuk merebut kembali wilayah Kamboja dan Cham yang hilang berabad-abad yang lalu (Gunaratna & Kam, 2016).

Ancaman Terorisme dari Luar Negeri

Selain ancaman teroris dalam negeri, menurut Stefanie Kam (Gunaratna & Stefanie Kam, 2016) ada satu kelompok teroris dari luar yang menjadi ancaman terorisme di Kamboja, yaitu Jamaah Islamiah (*the Jemaah Islamiah /JI*) melalui Yayasan Om Al Qura (*the Om Al Qura Foundation*). Jika teroris dalam negeri bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan, sedangkan teroris dari luar negeri bertujuan untuk menyebarkan paham/ideologi. Terorisme Kelompok Islam Radikal tiba di Kamboja, setidaknya secara simbolis ketika sekolah agama Om Al-Qura di provinsi Kandal digerebek dan ditutup pada 28 Mei 2003 dengan tuduhan memiliki hubungan dengan terorisme Islam radikal, khususnya Jamaah Islamiyah. Dua orang guru Thailand dan satu orang Mesir ditangkap dan didakwa melakukan percobaan aksi terorisme di Kamboja. Semua guru asing dan tanggungan mereka di sekolah diminta untuk meninggalkan Kamboja dalam waktu 72 jam. Sehubungan dengan tuduhan ini, organisasi Om Al-Qura dilarang di Kamboja dan dengan demikian sekolah lainnya di provinsi Kampong Chhnang juga ditutup. Tindakan cepat Pemerintah Kamboja ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah AS (Kok-Thay Eng, 2013). Jamaah Islamiyah (JI) telah berinvestasi dalam jaringan sekolah di seluruh Asia Tenggara melalui seorang pria bernama Zubair, seorang Malaysia yang belajar di Karachi, Pakistan. Melalui lembaga pendidikan ini, JI berupaya menciptakan rasa kebersamaan yang lebih luas. Yayasan Om Al-Qura di Kamboja adalah salah satu contoh sekolah yang digunakan untuk mendanai terorisme. Itu digunakan oleh Al Qaeda untuk menyalurkan dana yang signifikan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Jamaah Islamiyah yang terkait dengan Al Qaeda dengan kedok sebuah lembaga pendidikan. Berbasis di Arab Saudi, yayasan Om Al-Qura yang terkait dengan JI memiliki kantor di Bosnia, Somalia, Thailand selatan, dan Kamboja. Kantor tersebut terdaftar pada tahun 2003 sebagai organisasi amal yang memberikan dukungan kepada kelompok teroris. Om Al-Qura juga mengoperasikan sekolah Islam, sekolah Al Mukara di Kamboja. Yang terletak di pinggiran Phnom

Penh, Al Mukara mempekerjakan sebagian besar guru asing dan menerima sebagian besar dana dari Saudi. Sekolah tersebut didirikan seolah-olah untuk memenuhi kebutuhan populasi Muslim Kamboja yang kecil, yang telah dihancurkan di bawah Khmer Merah dari tahun 1975 hingga 1978 (Gunaratna & Kam, 2016).

Meskipun sejarah mencatat terdapat paling tidak ada tujuh kelompok teroris yang ada di Kamboja baik dari dalam negeri maupun luar negeri, namun Kamboja saat ini tidak terancam oleh kelompok teroris domestik terorganisir yang signifikan yang saat ini beroperasi di negara tersebut (Asia-Pacific Center for Security Studies, 2010). Hal ini sesuai dengan data *Global Terrorism Index* (Institute for Economics & Peace, 2020) yang menempatkan Kamboja di peringkat ke 135 negara terdampak aksi terorisme dengan skor 0,00 artinya tidak ada lagi ancaman dan aksi terorisme di Kamboja saat ini. Meskipun demikian, Pemerintah Kamboja mewaspadaai kerentanan Kamboja terhadap terorisme dan potensinya untuk digunakan sebagai “tempat berlindung” karena kedekatan geografisnya dengan serangan baru-baru ini dan kedekatannya dengan area jaringan operasi teroris oleh kelompok-kelompok teroris transnasional.

3.2. Kebijakan Pemerintah Kamboja dalam Menanggulangi Terorisme

Dalam hal penanggulangan terorisme, Pemerintah Kamboja telah membentuk Undang – Undang Penanggulangan Terorisme (Law on Counter Terrorism Kingdom of Cambodia, 2007). Adapun tujuan Undang – Undang tersebut adalah Pertama, untuk memberikan hukuman atas tindakan tertentu, sesuai dengan (a) 13 konvensi dan protokol PBB tentang pemberantasan Terorisme, (b) Resolusi Dewan Keamanan PBB yang berhubungan dengan terorisme, dan (c) 40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus dari *Financial Action Task Force on Money Laundering*. Kedua, sepanjang Undang-Undang ini tidak mengatur hal-hal lain yang diperlukan untuk memerangi terorisme, berlaku undang-undang lain, termasuk Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Ketiga, Undang-Undang ini memberikan mekanisme, sebagaimana disyaratkan oleh konvensi, protokol, resolusi dan rekomendasi tersebut, untuk kerjasama hukum internasional dalam kontra-terorisme, seperti ekstradisi dan bantuan timbal balik. Pembekuan properti organisasi dan perorangan yang terdaftar oleh komite yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1267, dan penyitaan harta benda dan harta benda teroris yang tercemar dan badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh teroris.

Dalam hal menutup akses pendanaan terorisme, prioritas rencana aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kamboja menurut Komite Koordinasi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (2018) meliputi : Pertama, meninjau dan memutakhirkan Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Tambahannya 2013-2017 berdasarkan risiko yang teridentifikasi. Kedua, memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan dari masing-masing sektor. Ketiga, memperkuat kerja sama dalam negeri dalam memerangi TPPU/TPPT. Keempat, membangun kapasitas penegak hukum dan otoritas kompeten lainnya. Kelima, meningkatkan kesadaran akan risiko yang teridentifikasi untuk semua entitas pelapor dan public. Pemerintah Kamboja juga membentuk pasukan khusus untuk menanggulangi terorisme yaitu *The Cambodian National Counter-Terrorism Special Force* (NTCSF). Pemerintah Kamboja telah mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap teroris, yang dibuktikan dengan kebijakan negara yang represif menyusul runtuhnya Khmer Merah. Pada tahun 1994, Kamboja menerapkan undang-undang baru yang melarang Khmer Merah dan menuduh kelompok tersebut atas serangkaian pelanggaran seperti tindakan yang berkontribusi pada pemisahan diri, tindakan yang berusaha untuk menghancurkan pemerintah, dan tindakan yang mendorong atau memprovokasi warga untuk menggunakan angkatan bersenjata melawan negara.

3.3. Upaya Pemerintah Kamboja dalam Kerjasama Kontra Terorisme di ASEAN

Pada tahun 1992, Kamboja meratifikasi empat konvensi internasional untuk memberantas terorisme dan menandatangani satu lagi tentang penindasan pendanaan untuk terorisme. Kamboja juga sedang dalam proses mengaksesi tujuh konvensi internasional penting lainnya yang penting bagi upaya anti-teroris regional. Pada tahun 2010, Kamboja juga meratifikasi Konvensi ASEAN tentang Kontra-Terrorisme (ACCT), yang menandakan kepatuhan efektifnya terhadap semua Konvensi dan Protokol PBB yang relevan mengenai Kontra-Terrorisme. Sebagai bagian dari Inisiatif Operasi Perdamaian Global AS-PBB 2010, Kamboja juga menjadi tuan rumah latihan pemeliharaan perdamaian multinasional berskala besar. Pada bulan September, NCTC menjadi tuan rumah Kelompok Kerja Sektor Area Pasifik dengan perwakilan dari negara-negara mitra ASEAN. Lokakarya tersebut menyediakan forum untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme, penanggulangan bencana, dan berbagi informasi dalam lingkungan multilateral antarlembaga. Di bidang kontra-terorisme, Kamboja juga telah bekerja sama dengan Thailand dalam keamanan lintas batasnya. Pada Juli 2010, pihak berwenang Kamboja menangkap dua warga negara Thailand dan mengembalikan mereka ke Thailand, di mana mereka menghadapi tuntutan pidana atas dugaan peran mereka dalam meledakkan granat di luar kantor pusat partai politik di ibu kota Thailand, Bangkok (Gunaratna & Kam, 2016). Kamboja juga aktif menjalin Kerjasama dengan negara – negara anggota ASEAN lainnya seperti Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme (Kementerian Pertahanan RI, 2016).

Selain kerjasama regional ASEAN, Kamboja juga telah bekerja sama dengan AS dalam berbagi informasi dan intelijen serta dalam menghentikan pendanaan teroris yang selanjutnya dapat mendukung jaringan teroris di wilayah tersebut. Kamboja terus bekerja dengan AS dan Australia untuk membangun kemampuan kontra-terorisnya. Pemerintah Kamboja juga telah meningkatkan pelatihan kontra-terorisme dan kerja sama internasionalnya dengan AS selama bertahun-tahun untuk menggagalkan peluang yang diberikan kepada teroris yang mungkin mengeksploitasi mereka untuk melakukan serangan. Pasukan Khusus Kontra-Terrorisme Nasional Kamboja telah menerima kontra- pelatihan terorisme dari Pasukan Khusus AS.

4. Kesimpulan

Kamboja merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak luput dari ancaman dan aksi terorisme. Kamboja tercatat ada 7 (tujuh) kelompok teroris dari dalam maupun luar negeri yaitu : Khmer Merah (*the Khmer Rouge*); Pejuang Kemerdekaan Kamboja (*Cambodian Freedom Fighters / CFF*); Gerakan Front Khmer (*Khmer Front Movement*); Front Persatuan Nasional Khmer (*the Khmer National Unity Front / KNUF*); Front Pembebasan Nasional Khmer (*Khmer National Liberation Front / KNLF*); Gerakan Kekaisaran (*Empire Movement*) dan Jamaah Islamiah (*the Jamaah Islamiah / JI*) melalui Yayasan Om Al Qura (*the Om Al Qura Foundation*). Meskipun Kamboja saat ini tidak terancam oleh kelompok teroris domestik terorganisir yang signifikan yang saat ini beroperasi di negara tersebut, namun pemerintah Kamboja tetap mewaspadai kerentanan Kamboja terhadap terorisme dan potensinya untuk digunakan sebagai “tempat berlindung” bagi kelompok teroris transnasional. Strategi yang telah diambil oleh Pemerintah Kamboja untuk menanggulangi terorisme seperti: pembentukan undang undang penanggulangan terorisme, pembentukan pasukan khusus penanggulangan terorisme dan menutup akses pendanaan terorisme. Selain itu, pada tingkat regional ASEAN, pemerintah Kamboja membentuk kerjasama dengan negara – negara ASEAN dalam menanggulangi terorisme melalui pertukaran informasi, latihan bersama dan ekstradisi. Sedangkan pada tingkat internasional Kamboja juga melakukan kerjasama penanggulangan terorisme dengan Amerika Serikat dan Australia.

5. Saran

Perlu adanya penelitian lanjutan terkait perbandingan upaya kontra terorisme yang dilakukan pemerintah Kamboja dan pemerintah Indonesia sehingga dapat menjadi bahan referensi dan evaluasi kedua belah pihak dalam upaya kontra terorisme.

Daftar Pustaka

- Anshori, P. (2018). *Peran ASEAN Convention on Counter Terrorism dalam Menanggulangi Terorisme di Asia Tenggara*. Universitas Diponegoro.
- Asia-Pacific Center for Security Studies. (2010). *Issues for Engagement : Asian Perspectives on Transnational Security* (D. Fouse (ed.)). Asia-Pacific Center for Security Studies.
- Bailey, K. D. (2007). *Methods of Social Research* (4th ed.). The Free Press.
- Bureau of Counterterrorism US Department of State. (2022). *Foreign Terrorist Organizations*. US Department of State. <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design; Choosing among five approach* (3rd ed.). Sage Publications, Inc.
- DACHS. (2011). *The Khmer Rouge Regime*.
- Gunaratna, R., & Kam, S. (2016). *Handbook of Terrorism in the Asia-Pacific*. Imperial Press.
- Herdiansyah, H. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif : Untuk Ilmu - Ilmu Sosial*. Salemba Empat.
- Hutasoit, I. R., Yonas, A. R., & Nugrahani, H. S. D. (2021). Penanganan imigran dan terorisme di Uni Eropa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 7(4), 507–516.
- Institute for Economics & Peace. (2020). *Global Terrorism Index 2020 : Measuring the Impact of Terrorism*.
- Jahroni, J., & Makruf, J. (2016). *Memahami Terorisme : Sejarah, Konsep, dan Model*. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta.
- Kementerian Pertahanan RI. (2016). *RI dan Kamboja Lanjutkan Pembahasan MoU Pertahanan*. <https://www.kemhan.go.id/2016/08/11/ri-dan-kamboja-lanjutkan-pembahasan-mou-pertahanan.html>
- Law on Counter Terrorism Kingdom of Cambodia, (2007). <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/04/Cambodia-Law-on-Counter-Terrorism-2007-eng.pdf>
- Kok-Thay Eng. (2013). *From the Khmer Rouge to Hambali : Cham Identities in a Global Age*. The State University of New Jersey.
- Komite Koordinasi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme. (2018). *Cambodia National Money Laundering And Terrorist Financing Risk Assessment Report*. https://www.nbc.org.kh/cafiu/download/Sanitized_NRA/Sanitized_NRA_Full_Version.pdf
- Korompis, H. R. H. (2020). *Strategi Indonesia Dalam Menangani Terorisme Melalui ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)*. Universitas Bosowa Makassar.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications, Inc.
- Simanjuntak, R. F. (2012). Motivasi Amerika Serikat Memberikan Bantuan Militer Kepada Kamboja Tahun 2010-2012 (Studi Kasus : Terorisme Khmer Rouge). *Repository Universitas Riau*, 2012, 1–15.
- Subagyo, A. (2015). *Teroris (Me) : Aktor dan Isu Global Abad XXI*. Penerbit Alfabeta.
- United States Bureau of Citizenship and Immigration Services. (2003). *Cambodia: Information on Cambodian Freedom Fighters (CFF)*. <https://www.refworld.org/docid/3f51e6f94.html>
- Widya, P. (2008). *Proses Rekonsiliasi Damai Kamboja 1982-1991*. Universitas Indonesia.

- Yahzunka, F., Siswoyo, M., & Ali, Y. (2018). Analisis kerjasama penanggulangan terorisme brunei darussalam di kawasan ASEAN. *Jurnal Prodi Peperangan Asimetris*, 4(1), 23–44.
- Yunanto, S., Damayanti, A., & Novitasari, I. (2017). *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia*. Institute for Peace and Security Studies (IPSS).
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.